

TABEL 7.1 KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab		
					2014	2019					
Misi 1 : Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan											
1	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja, dan penyerapan tenaga kerja	1 Memperluas kesempatan dan penyediaan lapangan kerja di pedesaan dan perkotaan	1.	Pengembangan dan pemberdayaan agroindustri berbasis industri kerakyatan yang memanfaatkan hasil pertanian setempat yang dapat menyerap tenaga kerja	Tingkat partisipasi angkatan kerja	69,95	70,30			Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi & Kependudukan	
			2.	Peningkatan akses pencari kerja (angkatan kerja) terhadap lapangan kerja di sektor formal melalui pengembangan jejaring informasi pasar kerja, job fair, magang kerja, agar dapat meningkatkan penempatan tenaga kerja melalui Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN)				Program Perluasan dan Penempatan Kerja	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi & Kependudukan	
		2 Meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kompetensi, serta ketrampilan tenaga kerja	1.	Pengembangan usaha produktif melalui kewirausahaan sehingga tercipta tenaga kerja yang mandiri dan produktif				Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi & Kependudukan	
			2.	Optimalisasi dan pengembangan kapasitas dan pendayagunaan UPT Pelatihan Kerja (Balai Latihan Kerja) berstandar internasional, serta perluasan skala pelatihan keterampilan tenaga kerja yang berkualitas				Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi & Kependudukan	
		3.	Meningkatkan penempatan penduduk potensial di daerah transmigrasi	1.		Peningkatan dan pengembangan kerja sama program transmigrasi dengan provinsi/kabupaten di luar Jawa			Program Mobilitas Penduduk.	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi & Kependudukan
		4.	Meningkatkan pengembangan kapasitas para santri pondok pesantren dalam bidang usaha produktif	1.		Peningkatan pelatihan keterampilan kerja para santri pondok pesantren, termasuk bantuan sarana, unyuk melakukan usaha produktif					
		5.	Meningkatkan perlindungan, pembinaan, dan pengawasan terhadap tenaga kerja yang akan dan sedang bekerja di luar negeri	1.		Peningkatan kapasitas dan kualitas tenaga kerja yang akan, dan sedang bekerja di luar negeri melalui pembinaan, perlindungan dan pengawasan terpadu			Program Perluasan dan Penempatan Kerja	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi & Kependudukan

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					2014	2019			
2	Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	1 Meningkatkan iklim investasi dan ketenagakerjaan yang kondusif	1. Peningkatan investasi melalui perbaikan iklim investasi untuk menciptakan kesempatan kerja baru	Presentase penurunan perkara perselisihan hubungan industrial yg masuk ke Pengadilan Hubungan Industrial.	37,8%	62,21%	Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja.	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi & Kependudukan
			2. Peningkatan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja, termasuk norma kerja, serta norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, dan menciptakan hubungan industrial yang kondusif	Jumlah SDM yg mendapat pelatihan/pembinaan di bidang hiperkes.	120 Orang	240 Orang	Program Pengawasan Ketenagakerjaan dan Perlindungan Tenaga Kerja.	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi & Kependudukan
				Jumlah pemeriksaan kesehatan tenaga kerja.	350 org	450 org	Program Pengawasan Ketenagakerjaan dan Perlindungan Tenaga Kerja.	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi & Kependudukan
3	Meningkatnya akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas	1 Meningkatkan akses pendidikan dasar dan menengah yang bermutu dan terjangkau	1. Peningkatan dan pengembangan secara bertahap Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun sebagai kelanjutan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	Angka Melek Huruf	90	93	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembiliah Tahun	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			2. Penurunan/penghilangan hambatan administratif pemberian bantuan bagi sekolah umum, sekolah agama, sekolah kejuruan, dan sekolah khusus	Angka Partisipasi Sekolah SD atau sederajat	95,62	100	Program Pendidikan Menengah	Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Angka Partisipasi Sekolah SMP atau sederajat	89,7	95,1	Program Pendidikan Non Formal	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		2 Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sekolah Menengah Kejuruan	1. Peningkatan rasio perbandingan jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Menengah Umum (SMU), 70% : 30%, untuk menyiapkan tenaga kerja terampil berpendidikan menengah.	Angka Partisipasi Sekolah SMA atau sederajat	71,12	76,22	Program Pendidikan Luar Biasa	Pendidikan	Dinas Pendidikan
				2 Pengembangan "Sekolah Menengah Kejuruan Mini" atau Balai Latihan Kerja di pondok pesantren untuk menyiapkan tenaga kerja terampil tingkat menengah.	1 Angka Partisipasi Murni SD atau sederajat	97,23	100		
			2 Angka Partisipasi Murni SMP atau sederajat		86,07	90,69			
			3 Angka Partisipasi Murni SMA atau sederajat		55,94	60,09			
			4 Angka Partisipasi Kasar SD atau sederajat		112,6	113,8			
			5 Angka Partisipasi Kasar SMP atau sederajat		102,1	103,9			

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	
					2014	2019				
					6 Angka Partisipasi Kasar SMA atau sederajat	74,21	78,41			
			3 .Peningkatan dan pengembangan penyediaan tambahan fasilitas dan program antara (bridging program) bagi lulusan sekolah kejuruan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi							
4	Meningkatnya kuantitas, dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD)	1 Meningkatkan aksesibilitas, dan kualitas PAUD	Pengembangan PAUD secara holistik dan terpadu	Angka Partisipasi Kasar PAUD	86,55	87,75	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pendidikan	Dinas Pendidikan	
			Peningkatan pemerataan dan akses PAUD, khususnya di daerah tertinggal, dan wilayah kepulauan							
			Peningkatan akses PAUD							
5	Meningkatnya mutu pendidikan, dan tenaga kependidikan	1 Meningkatkan kualitas, dan layanan pendidikan	1 .Peningkatan mutu dan sebaran tenaga kependidikan secara merata	Persentase Kualifikasi Guru menurut Ijazah ≥ D4/S1: - Jenjang SD/MI - Jenjang SMP/MTs - Jenjang SMA/SMK/MA	55,34 90,56 89	79,34 100 99	Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dan Tenaga Pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan	
				Tingkat Kelulusan SD/SMP/SMA						
			2 Peningkatan pendidikan non-formal berbasis komunitas	Angka Melek Huruf			Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan	
			3 Peningkatan layanan pendidikan berbasis manajemen pendidikan secara komprehensif dan terintegrasi	Jumlah Mahasiswa yang Mendapatkan Beasiswa			Program Pendidikan Tinggi	Pendidikan	Dinas Pendidikan	
			4 Peningkatan kualitas pendidikan pondok pesantren melalui bantuan penyelenggaraan pendidikan Diniyah, dan guru swasta							
		2 Meningkatkan minat baca masyarakat	1 Peningkatan kuantitas sarana dan prasarana perpustakaan, serta kapasitas kelembagaan secara terpadu	Jumlah Pengunjung Perpustakaan			Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Perpustakaan	Baperpus&arsip	
6	Meningkatnya kualitas peran pemuda, dan prestasi olahraga	1 Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan berbasis komunitas	1 Peningkatan kelembagaan karang taruna dan/atau organisasi lain yang berafiliasi dengan kepemudaan	Jumlah Pemuda Berprestasi	500	755	Program Pengembangan dan Kereserian Kebijakan Pemuda	Kepemudaan & Keolahragaan	Dinas Pemuda & Olahraga	
		2 Meningkatkan perlindungan bagi masa depan generasi muda	1 Peningkatan perlindungan generasi muda dari bahaya penyalahgunaan Napza, minuman keras, dan penyebaran HIV/AIDS	Jumlah PPLP di Daerah			Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Kepemudaan & Keolahragaan	Dinas Pemuda & Olahraga	
		3 Meningkatkan prestasi olahraga di berbagai event	1 Peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Jumlah Prestasi Keolahragaan			Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Kepemudaan & Keolahragaan	Dinas Pemuda & Olahraga	

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab		
					2014	2019					
7	Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan, termasuk tenaga medis dan non-medis secara merata	1	Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa, dan wilayah kepulauan	1	Peningkatan perluasan pelayanan kesehatan pondok bersalin desa (polindes) menjadi pondok kesehatan desa (ponkesdes) untuk lebih mendekatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa, dan wilayah kepulauan	Jumlah ponkesdes yang memenuhi standar	1.417 unit	2.350 unit	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		2	Meningkatkan sarana dan prasarana RSUD, puskesmas dan jaringannya sesuai dengan standar kesehatan	1	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana RSUD, puskesmas, dan jaringannya sesuai dengan standar	prosentase sediaan alkes yang memenuhi standar	0,78	0,9	Program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Pengamanan Makanan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Jumlah Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah sakit swasta terakreditasi versi 2012	3 RS	40 RS	Program Upaya Kesehatan Perorangan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		3	Meningkatkan ketersediaan dan pemerataan tenaga medis dan non-medis, serta perbekalan obat-obatan	1	Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga medis dan non medis serta obat-obatan secara merata sesuai dengan standar kesehatan	jumlah kab/kota/provinsi menyelenggarakan pengelolaan nakes sesuai standar	4 kab/kota	14 kab/kota	Program Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
						prosentase sediaan farmasi yang memenuhi standar	0,55	0,75	Program Kefarmasian, Alat Kesehatan dan Pengamanan Makanan	Kesehatan	
8	Menurunnya angka kematian bayi, dan angka kematian ibu melahirkan	1	Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu, anak, dan balita	1	Peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak dibawah lima tahun melalui penguatan dan pengembangan "Taman Posyandu" di setiap desa/kelurahan yang mengintegrasikan Posyandu, Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Bina Keluarga Balita (BKB).	Jumlah Posyandu menjadi Taman Posyandu	10.912 posyandu	12.033 posyandu	Program Promosi kesehatan dan Pemberdayaan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
9	Meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimum	1	Meningkatkan standar kualitas pelayanan RSUD, Puskesmas dan jaringannya	1	Peningkatan standarisasi pelayanan RSUD, puskesmas dan jaringannya secara merata	Jumlah Puskesmas PONEK yang memenuhi standar	253 unit	342 unit	Program Upaya Kesehatan Perorangan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
						RSUD Kabupaten/Kota menyelenggarakan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) sesuai standar	6 unit	30 unit	Program Upaya Kesehatan Perorangan	Kesehatan	
		2	Meningkatkan kesehatan masyarakat berbasis keluarga dan masyarakat melalui upaya promotif dan preventif	1	Peningkatan pelayanan Kesehatan komprehensif yang lebih mengedepankan upaya promotif preventif dengan tidak mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif	Jumlah Posbina aktif	19 unit	105 unit	Program Promosi kesehatan dan Pemberdayaan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Jumlah Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri (Puri)	775 unit	2596 unit	Program Promosi kesehatan dan Pemberdayaan	Kesehatan	

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab		
					2014	2019					
10	Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam jaminan kesehatan	1	Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya jaminan kesehatan melalui mekanisme Jamkesta (Jaminan Kesehatan Semesta) yang komprehensif dan terpadu	1	Pengembangan jaminan kesehatan semesta bagi seluruh penduduk Jawa Timur	% penduduk yang memiliki JKN	0,4	1	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		2	Meningkatkan layanan kesehatan bagi penduduk miskin	1	Peningkatan upaya meminimalkan hambatan keuangan bagi penduduk miskin dan rentan dalam mengakses memanfaatkan pelayanan kesehatan.	Jumlah Puskesmas yang memenuhi standar	83 unit	112 unit	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Jumlah Puskesmas Pembantu yang memenuhi standar	191 unit	258 unit	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
11	Meningkatnya akseptor Keluarga Berencana (KB), dan pelayanan kesehatan reproduksi	1	Meningkatkan layanan KB, dan kesehatan reproduksi secara komprehensif dan berkelanjutan	1	Peningkatan dan penguatan revitalisasi program keluarga berencana untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga.	Jumlah kab/kota mencapai target pelayanan KB aktif	15 kab/kota	28 kab/kota	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
12	Menurunnya persentase penduduk miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keperahan Kemiskinan	1	Meningkatkan keterpaduan program penanggulangan kemiskinan lintas dan antar sektor dengan lokasi dan sasaran tertentu "lokus-fokus"	1	Peningkatan dan penyempurnaan pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan di semua program yang ada di satuan kerja pemerintah daerah (SKPD), sekaligus memperbaiki efektivitas program	jumlah rakor lintas SKPD terkait sinergitas antar program penanggulangan kemiskinan	3 kali	6 kali	Program Pemberdayaan Fakir Miskin	Sosial	Dinas Sosial
				2	Peningkatan dan penyempurnaan program penanggulangan kemiskinan yang ditujukan untuk memangkas beban pengeluaran rumah tangga miskin	jumlah program penanggulangan kemiskinan yang dievaluasi supaya lebih efektif dan efisien	0	10 program	Program Pemberdayaan Fakir Miskin	Sosial	Dinas Sosial
						Prosentase RTM yang memperoleh akses usaha dan pemenuhan kebutuhan pokok minimum	0	152.343 KRTP			
				3	Peningkatan, dan penyempurnaan program penanggulangan kemiskinan dalam bentuk bantuan sosial, dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan penduduk miskin	jumlah program penanggulangan kemiskinan yang dievaluasi	0	10 program	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Pemberdayaan Masyarakat & Desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat
		2	Meningkatkan keberlangsungan usaha mikro dan kecil untuk menurunkan tingkat kemiskinan	1	Pengembangan dan perlindungan keberlangsungan usaha mikro dan kecil sektor informal di perkotaan maupun pedesaan untuk mencegah terjadinya pemiskinan lebih parah akibat kehilangan sumber nafkah	% Jumlah LKM yang menghasilkan keuntungan	17 LKM	125 LKM	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Pemberdayaan Masyarakat & Desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat

No.	Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan		Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
							2014	2019			
						% Jumlah LKM yang telah terfasilitasi legalitas usahanya	0	250 LKM	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Pemberdayaan Masyarakat & Desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat
		3	Meningkatkan kualitas manajemen Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	1	Peningkatan kualitas manajemen Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang memiliki kemampuan dan keberdayaan secara sosial maupun secara ekonomi	Keluarga miskin yang mendapatkan bantuan UEP melalui KUBE Fakmis	1000 KK	1000 KK	Program Pemberdayaan Fakir Miskin	Sosial	Dinas Sosial
		4	Mengoptimalkan fungsi Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)	1	Peningkatan keberdayaan masyarakat miskin sebagai aktor perubahan sosial yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya dalam menanggulangi kemiskinan mereka sendiri melalui konsep dan metode belajar sosial	Prosentase KPM yang terlatih sesuai Permendagri 7 / 2007	1.225 KPM	1.935 KPM	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat & Desa	Badan Pemberdayaan Masyarakat
		5	Meningkatkan akses dan fasilitas infrastruktur bagi penduduk miskin	1	Peningkatan perluasan akses penduduk miskin terhadap kredit mikro dengan suku bunga rendah						
				2	Peningkatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan yang menghubungkan tempat produksi pertanian dan tujuan pasar untuk menekan biaya angkut, yang dapat meningkatkan pendapatan penduduk miskin						
13	Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	1	Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi PMKS	1	Peningkatan kualitas hidup PMKS, dan peran aktif masyarakat dalam penanganan kesejahteraan sosial	1 Pendampingan Pemberdayaan Fakir Miskin	1.000 kk	1.000 kk	Program Pemberdayaan Sosial	Sosial	Dinas Sosial
						2 Pemberdayaan Keluarga Rentan	60 KK	60 KK	Program Pemberdayaan Sosial	Sosial	Dinas Sosial
						3 Pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi	77 org	77 org	Program Pemberdayaan Sosial	Sosial	Dinas Sosial
						4 Pelayanan Lanjut Usia Terlantar	60 LU	80 LU	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Sosial	Dinas Sosial
						Rehabilitasi Sosial Gelandangan dan Pengemis, eks gelandangan psikotik	340 org	340 org	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Sosial	Dinas Sosial
						5 Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat, Kusta	370 org	380 org	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Sosial	Dinas Sosial
14	Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan	1	Meningkatkan kualitas keadilan dan kesetaraan gender di segala sektor pembangunan	1	Peningkatan kualitas dan peran perempuan dalam pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan melalui upaya-upaya pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	67,16	68,85	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan & KB

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab			
					2014	2019						
				Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69,92	72,89	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan & KB			
				Presentase Penanganan Korban Kasus KDRT, Non KDRT dan Trafficking yang melapor, ditangani dan diselesaikan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)	100	100	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan & KB			
							Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan & KB			
							Program pengembangan Model Operasi BKB-Posyandu-PADU	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan & KB			
							Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan & KB			
							Program Keluarga Berencana	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan & KB			
							Program Pengembangan Model Operasional BKB - POSYANDU-PADU	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan & KB			
							Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan & KB			
							Program Pelayanan Kontrasepsi	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Badan Pemberdayaan Perempuan & KB			
Misi 2 : Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi												
1	Meningkatnya volume usaha UMKM dan kualitas kelembagaan Koperasi	1	Memperluas akses permodalan bagi UMKM melalui lembaga keuangan bank maupun non-bank	1	Perluasan jaringan akses permodalan UMKM melalui peran stimulasi pemerintah sebagai stimulan, lembaga keuangan bank dan non-bank, dengan mengutamakan pendampingan kepada UMK untuk kelancaran pembiayaan usaha	a.	Rasio PDRB UKM terhadap total PDRB (%)	54,58	55,13	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah,	Koperasi & UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM,
				2	Peningkatan peran Bank Indonesia maupun bank pelaksana untuk memperbesar pangsa kredit kepada UMKM melalui pemanfaatan <i>idle money</i>					Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi;		
				3	Peningkatan perluasan jaringan Bank UMKM di wilayah-wilayah strategis untuk mendukung kemudahan akses permodalan					Program pemberdayaan skala mikro		

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab		
					2014	2019					
		2	Meningkatkan peran UMKM dan koperasi dalam aktivitas ekonomi	1	Perluasan cakupan kelompok sasaran, substansi pendidikan dan pelatihan UMKM untuk efisiensi dan efektivitas proses usaha, termasuk manajemen pemasaran					Program Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif	
				2	Optimalisasi peran UMKM terhadap pembentukan PDRB, dan penciptaan lapangan kerja melalui fasilitasi skema pembiayaan, peningkatan daya saing, perluasan dan penguatan kelembagaan, serta peningkatan usaha koperasi					Program Peningkatan Manajemen Usaha Koperasi	
				3	Penyediaan dan perluasan akses pasar bagi UMKM dengan mengutamakan tujuan pasar dalam negeri, selanjutnya didorong untuk mampu bersaing ke pasar internasional					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
				4	Peningkatan dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan pengrajin melalui pembinaan sentra-sentra produksi/klaster disertai dukungan penyediaan infrastruktur yang makin memadai					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
				5	Peningkatan dan pengembangan lembaga keuangan mikro (LKM) pedesaan untuk mendukung pengembangan koperasi, serta usaha mikro dan kecil					Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	
				6	Peningkatan kualitas SDM pengelola koperasi melalui pelatihan untuk mendukung pengembangan koperasi					Program perencanaan, pengendalian dan pelaporan	
2	Meningkatnya jumlah wirausaha baru (WUB)		Meningkatkan inkubasi kewirausahaan bagi calon wirausaha baru	Peningkatan tumbuhnya wirausaha kelas menengah baru yang bergerak di sektor UMKM melalui pelatihan budaya usaha dan kewirausahaan, dan bimbingan teknis manajemen usaha, serta akses permodalan	Persentase kenaikan wirausaha baru (%)	-	15				
3	Meningkatnya volume usaha ekonomi kaum perempuan	1	Meningkatkan kualitas ekonomi produktif berbasis gender dalam pemenuhan hak-hak dasar untuk mencegah feminisasi kemiskinan	1	Peningkatan dan perluasan jaringan usaha, dan akses permodalan (kredit usaha) bagi perempuan melalui pengembangan lembaga keuangan non-perbankan	Perputaran Modal Kopwan (kali)	2	2,5	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi usaha Mikro kecil dan Menengah	Koperasi & UMKM	Dinas Koperasi dan UMKM,
				2	Peningkatan peran perempuan dalam pengembangan usaha ekonomi produktif, melalui berbagai pelatihan keterampilan, dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas usaha ekonomi perempuan						

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	
					2014	2019				
			3 Penguatan manajemen kelembagaan ekonomi perempuan untuk meningkatkan efisiensi skala usaha ekonomi kaum perempuan							
			4 Peningkatan fasilitasi sarana dan prasarana dalam rangka penguatan dan pengembangan ekonomi kaum perempuan	1						
4	Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan)	1 Meningkatkan kualitas intensifikasi pertanian (tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan)	1 Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian untuk meningkatkan surplus bahan pangan, khususnya padi, jagung, kedelai, gula, daging, telur, susu, dan ikan, untuk memenuhi konsumsi dan bahan baku industri pengolahan (agroindustri).	Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan terhadap PDRB	1,05	2,05 - 2,15	Program Peningkatan Produksi Pertanian	Pertanian	Dinas Pertanian	
				Pertumbuhan Sub Sektor Tanaman Perkebunan terhadap PDRB (%)	1,26	3,1 - 3,5	Program Peningkatan Produksi Perkebunan		Dinas Perkebunan	
				Pertumbuhan Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB (%)	1,03	4,58 - 4,81	Program Peningkatan Produksi Peternakan		Dinas Peternakan	
				Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB (%)	4,32	5,30	Program Pengembangan Budidaya Perikanan		Dinas Perikanan dan Kelautan	
							Program Pengembangan Perikanan Tangkap		Dinas Perikanan dan Kelautan	
					Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya hutan		Dinas Kehutanan			
		2 Meningkatkan pengendalian alih fungsi lahan pertanian	1 Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)							
		3 Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir	1 Pengembangan sarana prasarana dan kapasitas nelayan, serta usaha ekonomi produktif masyarakat kawasan pesisir, dan kepulauan					Program Pengembangan Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil		
		4 Meningkatkan pengembangan aneka usaha di kawasan hutan, dan usaha hutan rakyat	1 Perluasan areal hutan rakyat, dan pemanfaatan lahan bawah tegakan, sekitar hutan, serta pengembangan usaha non-kayu di kawasan hutan							
		5	Meningkatnya nilai tambah hasil dan daya saing produk pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan peternakan)	1 Meningkatkan usaha penanganan pascapanen, dan pengolahan hasil pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan peternakan)	1 Peningkatan nilai tambah (value added) sektor pertanian melalui perluasan penciptaan kawasan agropolitan dan agroindustri yg memiliki keterkaitan ke belakang (backward linkage) dan ke depan (forward linkage) pada sebaran lokasi potensial yang merata	prosentase nilai tambah usaha tani tanaman pangan (padi)	0,29	0,82	Program Pengembangan Agribisnis Pertanian	
							Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan		Dinas Perkebunan	

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					2014	2019			
							Program Pengembangan Agribisnis Peternakan		Dinas Peternakan
							Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		Dinas Perikanan dan Kelautan
		2	Meningkatkan kualitas proses dan produk pertanian (tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan peternakan) yang terstandarisasi	1	Peningkatan daya saing produk pertanian, dengan tetap melakukan perlindungan produk lokal, melalui peningkatan kualitas menuju standar mutu yang dipersyaratkan pada berbagai kawasan perdagangan	440	562	Program Peningkatan Produksi Pertanian	Dinas Pertanian
6	Meningkatnya akses petani dan nelayan terhadap faktor produksi, teknologi, informasi, pemasaran dan permodalan sehingga memiliki daya saing tinggi	1	Meningkatkan pemberdayaan kelembagaan petani dan nelayan secara berkelanjutan dan terpadu	1	Optimalisasi dan pemberdayaan kelembagaan petani/nelayan untuk meningkatkan akses petani/nelayan terhadap faktor produksi, teknologi, informasi, pemasaran maupun akses permodalan.	155	272	Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Pertanian	Dinas Pertanian
					Jumlah kelompok yang menerapkan Good Agriculture Practices (GAP)	23	33	Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Perkebunan	Dinas Perkebunan
							Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Peternakan	Dinas Peternakan	
							Program peningkatan kapasitas Petani Ikan/nelayan	Dinas Perikanan dan Kelautan	
							Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Bakorluh	
7	Meningkatnya ketersediaan pangan masyarakat (<i>food availability</i>)	1	Meningkatkan stok pangan masyarakat	1	Pengembangan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat, antara lain meliputi daging, beras, gula, kedelai, dan jagung			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan pangan masyarakat	Ketahanan Pangan
					Ketersediaan Pangan				Badan Ketahanan Pangan
					Beras	7.309.527	7.897.877		
					Daging	345.376	390.762		
					Ikan	1.317.288	1.724.478		
					Gula	1.227.898	1.376.878		
8	(Meningkatnya penyerapan pangan (<i>food utilization</i>))	1	Meningkatkan penganeekaragaman konsumsi pangan	1	Pengembangan penganeekaragaman konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) berbasis pangan lokal	82,2	87,7		Badan Ketahanan Pangan
		2	Meningkatkan penanganan keamanan pangan	1	Pengembangan pengawasan keamanan pangan				
9	Meningkatnya akses pangan (<i>food acces</i>)	1	Meningkatkan kelancaran distribusi pangan	1	Perbaikan dan pengembangan infrastruktur distribusi pangan	<10	<10		Badan Ketahanan Pangan
					Stabilisasi harga beras ditingkat konsumen (Cofisien variasi/CV)				

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					2014	2019			
			2 Pengembangan kelembagaan distribusi pangan masyarakat	Stabilisasi harga gabah ditingkat petani pada saat panen	HPP	HPP			
			3 Peningkatan peran pasar induk dalam distribusi pangan						
		2 Menjaga stabilitas harga pangan	Pengendalian harga pangan pokok dan pengembangan sistem informasi pasar (pasokan, harga dan akses)						
10	Meningkatnya volume ekspor dalam dan luar negeri	1 Memperkuat dan memperluas pasar dalam dan luar negeri	1 Peningkatan akses dan penetrasi ke pasar domestik melalui perluasan dan penguatan fungsi Kantor Perwakilan Dagang	Pertumbuhan sub sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	8,48	9,98 - 10,47	Program Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		2 Meningkatkan kerja sama ekonomi lokal, regional dan internasional	1 Optimalisasi akses dan penetrasi ke pasar ekspor konvensional, dan perluasan pasar ekspor non-konvensional				Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri		
		3 Meningkatkan daya saing Produk berbasis keunggulan lokal	1 Revitalisasi Puspa Agro menjadi <i>trading house</i> produk pertanian Jawa Timur				Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan		
			2 . Perluasan dan peningkatan substansi pameran dagang produk UMKM di pasar domestik maupun internasional						
			3 Peningkatan performa standarisasi Industri						
		4 Mengembangkan bahan baku substitusi impor	Peningkatan produk bahan baku/penolong domestik sebagai bahan pengganti/substitusi impor						
11	Meningkatnya kontribusi sektor industri	1 Meningkatkan pengembangan sektor industri	1 Peningkatan fasilitasi pengembangan industri kecil dan menengah non-agro yang memiliki daya penyebaran dan kepekaan tinggi, atau yang memiliki <i>backward</i> dan <i>forward linkage</i> yang tinggi	Pertumbuhan sektor Industri terhadap PDRB (%)	5,59	7,2 - 7,3	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			2 Peningkatan fasilitasi kerangka regulasi usaha skala menengah dan besar dan mendorong kemitraan usaha dengan pelaku mikro dan kecil				Program Peningkatan Kapasitas Teknologi Industri		
			3 Peningkatan fasilitasi penumbuhkembangan industri pengolahan agro dan non-agro				Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		
							Program Peningkatan Standardisasi Industri		
							Program Peningkatan Industri Berbasis Sumber Daya Alam		
12	Meningkatnya kunjungan wisata	1 Meningkatkan sektor pariwisata secara integratif, dan berdaya saing global	1 Peningkatan pengembangan destinasi pariwisata melalui perluasan pengembangan objek wisata alam dan buatan	Jumlah Kunjungan Wisata			Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pariwisata	Dinas Kebudayaan & Pariwisata

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab		
					2014	2019					
			2	Peningkatan cakupan substansi pameran produk pariwisata di pasar domestik dan internasional	Kontribusi sektor Pariwisata thd PDRB			Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pariwisata	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	
			3	Peningkatan fasilitasi sarana dan prasarana penunjang destinasi pariwisata				Program Pengembangan Kemitraan (diganti menjadi: Program Pengembangan Sumberdaya Kebudayaan dan Pariwisata)	Pariwisata	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	
			4	Penguatan kemitraan pemangku kepentingan kepariwisataan, perhotelan, restoran dan transportasi (maskapai, pelaku penyedia jasa pelayaran, penyedia jasa transportasi darat) untuk meningkatkan jumlah kunjungan dan lama hari berkunjung wisatawan nusantara serta wisatawan asing							
			5	Pengembangan pembangunan pariwisata yang terintegrasi dengan penanggulangan kemiskinan yang memberikan sumber penghasilan kolektif bagi komunitas masyarakat							
			6	Peningkatan fasilitasi kemitraan UMKM dan koperasi lokal dengan usaha pariwisata berskala besar							
			13	Meningkatnya kualitas seni dan budaya lokal	1	Meningkatkan pengembangan kualitas, dan pelestarian warisan seni budaya lokal	1	Peningkatan penyelenggaraan festival budaya lokal di event nasional dan internasional			Program Pengembangan Nilai Budaya
				2	Peningkatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian kekayaan seni budaya lokal			Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	
				3	Peningkatan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian kekayaan budaya lokal			Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan & Pariwisata	
				4	Peningkatan pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum, dan peninggalan bawah air						
14	Meningkatnya jumlah izin prinsip dan realisasi PMA, PMDN, dan investasi daerah	1	Meningkatkan iklim investasi yang kondusif	1	1. Peningkatan investasi dalam negeri (PMDN), dan PMA dengan mendorong kemitraan PMA dan PMDN, serta kebijakan pemanfaatan bahan baku lokal bagi PMA	210,8	282,45	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Penanaman Modal	Badan Penanaman Modal	
				2	2. Pengembangan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang diperdagangkan	38,95	52,00	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		Badan Penanaman Modal	

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					2014	2019			
				3 Jumlah Nilai Investasi PMA berdasarkan LKPM (Trilyun Rupiah)	33,63	44,98			Badan Penanaman Modal
				4 Jumlah Nilai Realisasi Investasi PMDN berdasarkan LKPM (Trilyun Rupiah)	34,85	46,70			Badan Penanaman Modal
		2 Meningkatkan kapasitas SDM dan infrastruktur pendukung investasi	Peningkatan kapasitas pelayanan perizinan melalui peningkatan infrastruktur pelayanan perizinan, kepastian prosedur dan jenis layanan, serta kapasitas SDM pelayanan						
		3 Meningkatkan promosi investasi secara terpadu	Peningkatan cakupan substansi pameran investasi berskala domestik, nasional, dan internasional						
15	Meningkatnya kinerja pelayanan, dan pembangunan prasarana transportasi jalan, serta terwujudnya keselamatan, efisiensi dan efektivitas pelayanan angkutan darat, laut, dan udara	1 Meningkatkan konektivitas ekonomi melalui ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan handal	1 Pengembangan transportasi untuk mendukung sentra produksi agropolitan, dan sumber daya alam lainnya dalam kawasan strategis ekonomi, serta kawasan andalan untuk mendukung sentra produksi pada 38 simpul kabupaten/kota	1 Persentase Penyelesaian Jalan Lintas Selatan	28,79	38,94	Program Dukungan Prasarana Kebinamargaan	Pekerjaan Umum	Dinas PU Bina Marga
				2 Persentase Penyelesaian Jembatan Lintas Selatan	52,07	63,39	Program Dukungan Prasarana Kebinamargaan	Pekerjaan Umum	Dinas PU Bina Marga
				3 Persentase Jalan Tembus Yang Terbangun	-	5,90	Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	Dinas PU Bina Marga
				4 Persentase Jembatan pada Jalan Tembus Yang Terbangun	-	63,39		Pekerjaan Umum	Dinas PU Bina Marga
				5 Persentase jalan provinsi yang mempunyai lebar perkerasan minimum 7 meter.	35,88	49,90		Pekerjaan Umum	Dinas PU Bina Marga
				6 Persentase Jembatan & Gorong-gorong Provinsi Yang Baik Dan Berfungsi	31,09	33,77		Pekerjaan Umum	Dinas PU Bina Marga

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab			
					2014	2019						
			2	Pengembangan pembangunan dermaga/transportasi antar-pulau untuk mendukung penanganan kawasan tertinggal, terutama di wilayah Kepulauan Madura, dan pulau-pulau lainnya	Rata-rata prosentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang dibandingkan kebutuhan	18,00	20,00	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas		Dinas Perhubungan & LLAJ		
					Jumlah Pelabuhan di Jawa Timur	42,00	42,00	Program Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Transportasi Laut		Dinas Perhubungan & LLAJ		
					Jumlah peserta kampanye peningkatan keselamatan pelayaran	600,00	3.000,00			Dinas Perhubungan & LLAJ		
					Jumlah pembangunan / peningkatan pelabuhan laut di kepulauan Madura & pulau-pulau lainnya	2,00	4,00	Program Dukungan Sarana Prasarana Transportasi		Dinas Perhubungan & LLAJ		
			3	Pengembangan jalur komuter perkeretaapian, dan pengembangan rel perkeretaapian ganda (<i>double track</i>)	% Jumlah Alarm Early Warning System terpasang dbandingkan jumlah perlintasan sebidang yang tidak dijaga (resmi)	13,00	16,00	Program Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perkeretaapian		Dinas Perhubungan & LLAJ		
						4	Peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana transportasi jalan	Persentase Jalan Provinsi dengan Kondisi Mantap	86,74	96,74	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum
			Persentase Jembatan & Gorong-gorong Provinsi Dengan Lebar Minimum 9	31,09	64,93					Dinas PU Bina Marga		
			2	Meningkatkan kinerja pelayanan angkutan darat, laut dan udara yang efisien dan efektif	1	Pengembangan perluasan sistem angkutan umum, termasuk busway /monorel	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Perhubungan LLAJ Prov. Jatim	80,00	484,00	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		Dinas Perhubungan & LLAJ
							Jumlah Jembatan Timbang yang memenuhi standarisasi ISO 9001:2000 Pelayanan Angkutan Umum dan Barang	20,00	20,00			Dinas Perhubungan & LLAJ

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	
					2014	2019				
				Jumlah Unit Pelaksana Pengendalian Kelebihan Angkutan Barang	20,00	20,00			Dinas Perhubungan & LLAJ	
				Pembangunan fasilitas penunjang angkutan umum	-	3 kab/kota	Program Dukungan Sarana Prasarana Transportasi			
				Rata-rata prosentase fasilitas perlengkapan jalan yang dipelihara dibandingkan fasilitas perlengkapan jalan terpasang	20,00	120,00	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		Dinas Perhubungan & LLAJ	
				% Jumlah Prasarana, Sarana dan Gedung Operasional Dishub dan LLAJ yang dipelihara dibandingkan Jumlah Prasarana, Sarana dan Gedung Operasional Dishub dan LLAJ	50,00	50,00			Dinas Perhubungan & LLAJ	
				Jumlah Penyidik PNS Bidang LLAJ yang mengikuti pembinaan	100,00	100,00	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor		Dinas Perhubungan & LLAJ	
				Jumlah Perusahaan Karoseri dan Konstruksi Kendaraan Bermotor	100,00	100,00			Dinas Perhubungan & LLAJ	
			2	Pengembangan terminal kelas A, B dan C, serta optimalisasi terminal kargo dan peti kemas	Jumlah Kabupaten / Kota yang memperoleh predikat Wahana Tata Nugraha dibandingkan jumlah peserta dari Kab/Kota	55,00	55,00	Program Dukungan Sarana Prasarana Transportasi		Dinas Perhubungan & LLAJ
			3	Peningkatan pembangunan dan pengembangan pelabuhan umum	Jumlah Pelabuhan di Jawa Timur	42,00	42,00	Program Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Transportasi Laut		Dinas Perhubungan & LLAJ
				Jumlah peserta kampanye peningkatan keselamatan pelayaran	600,00	3.000,00				

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	
					2014	2019				
			4 Pengembangan pembangunan pelabuhan khusus	Pendidikan Masyarakat Produktif melalui Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pelabuhan Khusus	-	100,00	Program Dukungan Sarana Prasarana Transportasi		Dinas Perhubungan & LLAJ	
				5 Peningkatan pembangunan dan pengembangan Bandar Udara Juanda dan Abdul Rahman Saleh Malang	Jumlah Bandar Udara di Jawa Timur	6,00	6,00	Program Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Transportasi Udara		Dinas Perhubungan & LLAJ
					prosentase peningkatan jumlah penumpang di Bandara Abd. Saleh Malang	4,00	3,00			Dinas Perhubungan & LLAJ
					prosentase peningkatan jumlah pergerakan pesawat di Bandara Abd. Saleh Malang	1,00	0,50			Dinas Perhubungan & LLAJ
					Jumlah bongkar muat barang dalam negeri	87.949.366,00	598.223.919,45			Dinas Perhubungan & LLAJ
				6 Peningkatan pembangunan dan pengembangan bandar udara perintis untuk penerbangan antar-kota (<i>city link</i>)	Jumlah pembangunan dan pengembangan Bandara Perintis untuk penerbangan antar kota (<i>citylink</i>)	1,00	2,00	Program Dukungan Sarana Prasarana Transportasi		Dinas Perhubungan & LLAJ
16	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air minum, dan sanitasi	1 Meningkatkan kinerja penyediaan dan pengelolaan air minum dan sanitasi	1 Peningkatan ketersediaan dan cakupan pelayanan air minum dan sanitasi dengan harga terjangkau	Persentase Tingkat Pelayanan Air Bersih	61%	67%	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan	Pekerjaan Umum	Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang	
				Persentase Tingkat Pelayanan Air Limbah	60%	65%				
				Persentase Pelayanan Drainase Perkotaan	76%	82%				
				Persentase Capaian Layanan Persampahan Perkotaan	79%	85%				
		2 Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hunian yang layak bagi masyarakat miskin, dan masyarakat berpenghasilan rendah	1 Peningkatan pemenuhan perumahan yang layak huni bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah	Persentase rusun terbangun	39%	64%	Program Pembangunan Perumahan	Perumahan	Dinas PU Cipta Karya & Tata Ruang	
				Persentase RTLH terenovasi	34%	59%				

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab		
					2014	2019					
17	Meningkatnya pengelolaan sumber daya air melalui konservasi dan pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air, dan penyediaan data serta informasi sumber daya air	1	Meningkatkan konservasi sumber daya air secara berkelanjutan	1. Peningkatan pembangunan dan rehabilitasi waduk, DAM, dan embung	Luas areal layanan irigasi	2.055.362 ha	2.055.362 ha	- Program konservasi sumber daya air	Pekerjaan Umum	Dinas PU Pengairan	
				2. Peningkatan rehabilitasi kerusakan daerah tangkapan air (<i>catchment area</i>) dan sumber air							
				3. Peningkatan upaya mempertahankan sumber air, dan merehabilitasi resapan untuk menjaga ketersediaan air sepanjang tahun					- Program pendayagunaan sumber daya air		
		2	Mengendalikan daya rusak air dan Pendayagunaan sumber daya air untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat	1. Peningkatan pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air irigasi, difokuskan pada peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun tapi belum berfungsi, rehabilitasi areal irigasi berfungsi yang rusak, dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan					- Program pengendalian daya rusak air		
				2. Peningkatan percepatan pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur yang menunjang pembangunan sektor pertanian dan wilayah pedesaan							
				3. Peningkatan pengembangan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT)							
				4. Peningkatan pembangunan embung berteknologi geo-membran di lokasi rawan kekeringan, jauh dari sumber air dan kondisi tanah porus, sebagai solusi jangka pendek mengantisipasi bencana kekeringan							
18	Meningkatnya infrastruktur dan ketersediaan energi	1	Mengembangkan dan meningkatkan pemerataan sumber energi	1	Pengembangan dan peningkatan penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) yang potensial, terutama sebagai sumber energi listrik, dan berbagai keperluan lainnya	Rasio ketersediaan listrik (%)	71,03	74,03	Program Inventarisasi, Pemanfaatan dan Pengawasan Energi dan Ketenagalistrikan	Energi & Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM
					Rumah tangga pengguna listrik (%)	99,58	99,64				
		2	Mengembangkan dan meningkatkan pemerataan pasokan listrik		Pengembangan dan peningkatan pembangunan jaringan, terutama di wilayah yang belum terjangkau jaringan PLN				Program Inventarisasi, Pemanfaatan dan Pengawasan Energi dan Ketenagalistrikan	Energi & Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab		
					2014	2019					
		3	Mengembangkan pengelolaan kelistrikan, energi, minyak dan gas	Peningkatan koordinasi dan kerja sama dengan seluruh stakeholder dalam pengelolaan kelistrikan, energi, minyak dan gas			Program Inventarisasi, Pemanfaatan dan Konservasi, serta Pengawasan Pertambangan Umum/SD Mineral dan Migas	Energi & Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM		
		4	Meningkatkan pembinaan usaha pertambangan dan pengelolaan air tanah	Peningkatan kapasitas pelaku pertambangan dan efisiensi penggunaan air tanah			Program Pengelolaan Air Tanah.	Energi & Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM		
								Program Pengembangan sumber daya geologi dan bencana geologi	Energi & Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM	
19	Meningkatnya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	1	Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan informasi dan komunikasi	1	Pengembangan informasi dan teknologi tepat guna melalui diseminasi informasi dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat						
Misi 3 : Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan ruang											
1	Meningkatnya luas hutan dan/atau lahan kritis yang direhabilitasi	1	Meningkatkan pengendalian, perluasan, dan rehabilitasi hutan	1	Peningkatan rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan hidup, khususnya kawasan hutan, dengan memilih tanaman pohon bermasa tumbuh relatif pendek		50.000	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Hutan	Lingkungan Hidup	Dinas Kehutanan	
						Rehabilitasi lahan kritis (lokasi)	45	75	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup
2	Meningkatnya sumber daya air terkonservasi	1	Meningkatkan upaya konservasi sumber daya air, dan peningkatan fungsi jaringan irigasi	1	1. Peningkatan upaya konservasi sumber daya air untuk mewujudkan keberlanjutan kapasitas pasok sumber daya air, di samping untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, juga kebutuhan air irigasi pertanian rakyat	Reboisasi kawasan Tahura R. Soerjo (Ha)	300	2.550	Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan	Lingkungan Hidup	Dinas Kehutanan
						Cakupan konservasi (penghijauan) sumber mata air (titik)	300	390	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup
				2	2. Pengembangan penyediaan air irigasi melalui peningkatan fungsi jaringan irigasi, rehabilitasi dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan dengan mempertimbangkan ketersediaan air dan kesiapan petani						
3	Meningkatnya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup terutama sumberdaya air, DAS, dan wilayah pesisir serta laut	1	Meningkatkan partisipasi aktif seluruh stakeholder dalam upaya menjaga sumber daya air, sungai, pesisir dan laut	1	Pengembangan kelembagaan pengelolaan sumber daya air melalui peningkatan peran dan keterlibatan semua pemangku kepentingan (stakeholders), serta menggali dan mengembangkan modal sosial, merevitalisasi peran lokal tradisional dalam pengelolaan dan pemeliharaan sumber daya air untuk irigasi pertanian						

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					2014	2019			
			2 Pemberdayaan komunitas masyarakat yang bertempat tinggal di sepanjang daerah aliran sungai untuk mengawasi pencemaran air sungai, dan memelihara lingkungan hidup	Persentase titik pantau dg peningkatan kualitas air	0,3	0,36	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.	Lingkungan Hidup	Badan Lingkungan Hidup
			3 Peningkatan upaya konservasi pesisir dan laut, serta merehabilitasi ekosistem yang rusak, dan menggiatkan kemitraan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut	Rehabilitasi mangrove (ha)	445	1283,43	Program Pengembangan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Lingkungan Hidup	Dinas Perikanan dan Kelautan
			4 Peningkatan pengembangan mekanisme perlindungan bagi masyarakat dari dampak bencana alam				Program Pemulihan Sumber Daya Ikan dan Perairan Umum Daratan	Lingkungan Hidup	Dinas Perikanan dan Kelautan
4	Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	1 Melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	1 Peningkatan koordinasi lintas sektor yang berpotensi menghasilkan emisi GRK, terutama sektor energi, transportasi, industri, pertanian, kehutanan dan pengelolaan limbah	Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (juta ton eq CO2)	100	80	Program Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (baru)	Lingkungan Hidup	Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, Dinas ESDM, Dishub & LLAJ, Dinas Perindag, Badan Lingkungan Hidup
5	Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang	1 Pengembangan kawasan strategis dalam rangka pertumbuhan dan pemerataan wilayah	1. Menetapkan Rencana Kawasan Strategis Provinsi dalam mendorong pengembangan wilayah	Prosentase RTR Kawasan Strategis Provinsi yang tersusun	41,03%	100%	Program Perencanaan Tata Ruang	Penataan Ruang	Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang
		2 . Meningkatkan peran rencana tata ruang sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang provinsi	2. Peningkatan rasio ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Provinsi				Program Perencanaan Tata Ruang	Penataan Ruang	Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang
		3 Perumusan peraturan/kebijakan sebagai dasar Pemanfaatan ruang di Jawa Timur	3. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan pemanfaatan ruang				Program Pemanfaatan Ruang	Penataan Ruang	Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang
		4 Peningkatan ketaatan Rencana Tata Ruang di Provinsi Jawa Timur	4. Fasilitasi Upaya ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang				Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Penataan Ruang	Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang
6	Meningkatnya fasilitasi tentang perlindungan terhadap luasan lahan pertanian	Menetapkan dan mempertahankan luasan LP2B dalam rangka swasembada beras	Peningkatan fasilitasi upaya mendorong luasan LP2B dalam rangka swasembada beras						

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab		
					2014	2019					
Misi 4 : Meningkatkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik											
1	Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik	1	Meningkatkan efektivitas kelembagaan pemerintahan melalui peningkatan kapasitas SDM, dan ketersediaan sarana prasarana yang memadai, serta memberi ruang bagi masyarakat untuk pengawasan pelaksanaan pemerintahan	1	Pengembangan konsep reformasi birokrasi sebagai reformasi administrasi yang terdiri dari elemen regulasi, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kontrol masyarakat, untuk menghasilkan pelayanan publik yang lebih jelas tolok ukurnya	Event yang digelar	75	62	Program Peningkatan Kerjasama	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm.Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Kantor Perwakilan
						1. Prosentase tersebarluasnya informasi kehumasan dan keprotokolanan (persen)	100%	100%	1. Program Media dan Informasi 2. Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm.Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Biro Humas & Protokol
		2	Meningkatkan manajemen aparatur secara efisien dan efektif dalam pelayanan publik secara profesional		Peningkatan efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat pelayanan publik	Persentase Cakupan Layanan Keprotokolanan (Persen)	100%	100%	Program Keprotokolanan		Biro Humas & Protokol
2	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1	Meningkatkan penerapan prinsip tata kelola yang baik secara konsisten	1	Peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui pelaksanaan standar pelayanan minimal serta optimalisasi peran pengawasan internal oleh Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) dan pengawasan masyarakat.	1. % Kepatuhan terhadap Inmendagri 188.52/1997/SJ/2012 tentang peningkatan transparansi pengelolaan anggaran daerah 2. Opini BPK terhadap LKPD Provinsi Jawa Timur; 3. Kategori hasil Evaluasi SAKIP Pemprov Jawa timur; 4. Kategori Hasil Evaluasi atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	1. 50% 2. WTP 3. B 4. Tinggi	1. 100% 2. WTP 3. B 4. Tinggi	1. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm.Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Inspektorat
									2. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan		

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab								
					2014	2019											
				2 Penguatan aksi anti-korupsi, dan pemberantasan korupsi, serta memperluas secara bertahap zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)			3. Program Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja										
										2	Meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi publik secara efisien dan efektif	Peningkatan akses informasi publik secara akurat dan <i>up to date</i>			1. Program Pencegahan Korupsi		
3	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program, serta kegiatan pembangunan	1	Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian secara terpadu antar dan lintas SKPD	1	Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, serta sinergi perencanaan pembangunan antar dan lintas SKPD	Persentase (%) Jumlah koordinasi, fasilitasi dan money yang ditindaklanjuti oleh SKPD terkait	50%	65%	Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm.Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Bakorwil PP I Madiun, II Bojonegoro, III Malang, IV Pamekasan						
						Persentase (%) Jumlah keterisian data dan informasi kegiatan yang dilaksanakan	52%	66%	Program pengembangan Data Informasi	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm.Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Bakorwil PP I Madiun, II Bojonegoro, III Malang, IV Pamekasan						
						Prosentas Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan (%)	100%	100%	1. Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK 2. Program Penguatan Sestim Inovasi Daerah (SiDA) 3. Program Desiminasi Hasil Penelitian dan Pengembangan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm.Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Badan Penelitian & Pengembangan						
						1. Prosentas Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan (%)	100%	100%	1. Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK 2. Program Penguatan Sestim Inovasi Daerah (SiDA) 3. Program Desiminasi Hasil Penelitian dan Pengembangan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm.Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Badan Penelitian & Pengembangan						
4	Meningkatnya peran DPRD sesuai dengan fungsinya	1	Meningkatkan kapasitas SDM legislatif sesuai dengan fungsinya	1	Peningkatan kapasitas anggota legislatif beserta kelembagaannya secara berkelanjutan												

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					2014	2019			
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	1 Meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	1 Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara terpadu						
6	Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi dan handal, serta ketersediaan dokumen statistik yang terpercaya dan berkualitas	1 Meningkatkan pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi, dan handal	1 Peningkatan pengelolaan arsip pemerintah daerah secara profesional yang didukung sistem kearsipan yang komprehensif	Pengelolaan Arsip secara Baku	3000	6000	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Kearsipan	Baperpus&arsip
				SDM Pengelola Arsip	350	704	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah	Kearsipan	Baperpus&arsip
							Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan	Kearsipan	Baperpus&arsip
		2 Meningkatkan kualitas dokumen statistik yang akurat dan valid	1 Peningkatan ketersediaan dokumen statistik daerah yang akurat dan <i>up to date</i>						
7	Mewujudkan sistem penanggulangan bencana untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana	1 Menguatkan tata kelola kelembagaan pemerintahan, koordinasi lintas sektor dan wilayah dalam penanggulangan bencana (pra, tanggap, pasca bencana)	1 Mengembangkan sistem penanggulangan bencana yang berbasis tata kelola pemerintahan, responsiv, transparan dan akuntabel.	Persentase desa tangguh dikawasan rawan Bencana (%)	4	54	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana		BPBD
		2 Menguatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana	1 Menciptakan sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana	Tertangani korban bencana secara cepat dan tepat sasaran (%)	100	100	Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana		BPBD
			2 Peningkatan pengembangan mekanisme perlindungan bagi masyarakat dari dampak bencana alam	Jumlah dokumen rencana pemulihan daerah dampak bencana yang terealisasi	15	100	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana		BPBD
		3 Penyediaan alokasi pendanaan pada saat status darurat bencana (siaga, tanggap, transisi)	1 Pemenuhan kebutuhan pada saat status darurat bencana yang pendanaannya dialokasikan khusus untuk BPBD yang dititipkan melalui dana BTT (BPKAD) dan pencairannya melalui SK Status Keadaan Darurat Bencana				Program Penyusunan Perencanaan, Fasilitasi dan Monev Penanggulangan Bencana		BPBD
Misi 5 : Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial									
1	Meningkatnya fasilitasi layanan keagamaan	1 Meningkatkan fasilitasi layanan keagamaan melalui bantuan dan koordinasi antara pemangku kepentingan dan pemerintah	1 Peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.	Fasilitasi kegiatan keagamaan			Program Fasilitasi Kebijakan Pembangunan Bidang Administrasi Kemasyarakatan	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm.Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	Biro Administrasi Kemasyarakatan

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					2014	2019			
							Program Dukungan Pelayanan Administrasi Kemasyarakatan		Biro Administrasi Kemasyarakatan
			2. Peningkatan kualitas pelayanan keagamaan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk agama, serta beribadat sesuai agama dan kepercayaan masing-masing						
2	Meningkatnya komunikasi antar-umat beragama	1 Meningkatkan kerukunan antar-umat beragama melalui berbagai forum dialog sosial maupun ekonomi	1 Peningkatan dan memperkuat kerukunan internal, dan antar-umat beragama untuk menciptakan harmoni sosial berlandaskan sikap toleran dan saling menghormati	konflik antar dan inter umat beragama					
			2 Peningkatan jaringan kerja sama lintas umat beragama, dan forum silaturahmi lintas pemuka agama, serta mendorong berkembangnya kerja sama internal dan/atau antar-umat beragama di bidang sosial ekonomi						
			3 Pengembangan resolusi konflik dalam mengatasi konflik sosial berdimensi agama, suku, ras maupun antar-golongan						
3	Terciptanya situasi kondisi masyarakat yang aman, tenteram, nyaman, dan tertib	1 Memelihara kewaspadaan nasional agar terhindar dari upaya pemecahbelahan bangsa (disintegrasi bangsa) melalui gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban	1 Revitalisasi keamanan berbasis komunitas untuk mewujudkan keamanan lingkungan, termasuk mencegah tumbuhnya permasalahan yang berkaitan penggunaan dan penyebaran narkoba, serta terorisme						
		2 Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan komunitas	1 Peningkatan peran serta masyarakat dalam penciptaan keamanan dan ketertiban melalui mekanisme community policing						
		3 Meningkatkan aktivitas yang mendorong rasa kebanggaan kebangsaan (nasionalisme), dan sikap saling menghormati antar-sesama melalui pengembangan wawasan kebangsaan yang berkesinambungan	1 Peningkatan fasilitasi aktivitas yang menumbuhkan semangat nasionalisme dan patriotisme, akhlak mulia, serta kemampuan untuk hidup bersama dalam masyarakat multikultur						

No.	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
					2014	2019			
4	Menguatnya budaya dan tradisi lokal sebagai bagian dari upaya mewujudkan harmoni sosial	1	Meningkatkan kualitas, dan pelestarian warisan budaya, serta tradisi lokal	1	Revitalisasi budaya dan tradisi lokal untuk mendukung pembangunan partisipatoris berbasis komunitas				
				2	Pengembangan dan pemanfaatan kearifan lokal untuk pemberdayaan masyarakat				
5	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang hukum dan HAM	1	Meningkatkan sosialisasi mengenai hukum dan HAM	1	Mengembangkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban asasi manusia di dalam berdemokrasi yang menjunjung tinggi supremasi hukum				
6	Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat menjunjung supermasi hukum, dan penghormatan terhadap HAM	1	Meningkatkan kegiatan forum masyarakat dalam bidang hukum dan HAM	1	Mendorong pembentukan dan pengembangan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan				
7	Meningkatnya penguatan <i>civil society</i> dalam bidang hukum dan HAM	1	Meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat/LSM dalam bidang hukum dan HAM	1	Meningkatkan keberdayaan organisasi kemasyarakatan/LSM dalam mencegah, dan mengevaluasi ketidakadilan, diskriminasi, serta pelanggaran HAM lainnya, sebagai bagian penguatan <i>civil society</i>				